

## ABSTRAK

Lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu menyerap jumlah pencari kerja yang dari tahun ke tahun terus bertambah. Kebutuhan hidup yang mendesak menjadi alasan utama bagi para pencari kerja untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Keinginan untuk merubah nasib dengan cara cepat membuat para pencari kerja ini memutuskan untuk bekerja keluarga negeri dengan harapan bahwa dengan gaji yang tinggi akan membuat nasib mereka dan keluarganya segera berubah. Segala resiko yang ada ditempuh tanpa memperhatikan resiko yang dihadapi bila sampai terjadi pemalsuan dokumen seperti yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dalam menyikapi aduan yang diajukan oleh masyarakat ketika terjadi permasalahan pemalsuan dokumen menggunakan jalan mediasi.

Adapun penelitian tesis ini merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum melalui mediasi penal terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen oleh CTKI di Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimanakebijakan hukumseharusnya terhadap tindak pidanapelaku pemalsuan dokumen oleh CTKI sekarang?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis adalah di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, observasi langsung, dan pencatatan dokumen yang ada.

Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan pra penempatan bagi CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia) sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam menghadapi pemalsuan dokumen yaitu dengan cara melakukan mediasi atau musyawarah terhadap pihak terkait. Diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap CTKI dan PPTKIS, serta edukasi bagi seluruh masyarakat. Selain itu juga kerja sama lintas sektoral.

Layanan Terpadu Satu Atap akan di terapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk melindungi warganya yang ingin pergi ke luar negeri supaya tidak terjadi lagi pemalsuan dokumen.

Kata Kunci : Kebijakan Perlindungan Hukum, Mediasi Penal, Dinas Tenaga Kerja, Pemalsuan Dokumen

## ABSTRACT

Jobs would not be able to absorb the number of job seekers from year to year continues to grow. Urgent necessities of life as the main reason for job seekers to mempeerbaiki family economy. The desire to change the fate of the quick way to create these job seekers decided to work the family land with the hope that the high salary would make their fortune and family soon changed. All the risks that exist taken without regard to the risk faced when it comes to happen forgery of documents as had been required by Act No. 39 of 2004 regarding the Placement passage and Protection of Indonesian Workers Abroad. Department of Labor Kendal in addressing complaints submitted by the public when there is a problem of falsification of documents using the mediation.

The thesis is to formulate the problem as follows:

1. What protection policies through mediation penal laws against the crime of falsification of documents by CTKI in Kendal?
2. How should the legal policy against the crime of counterfeiting documents by CTKI now?

The approach used in this study is a sociological juridical approach is in dealing with the issues discussed by the regulations in force then corresponds to the realities in society. The method used is descriptive qualitative. Data was collected by interviewing the parties involved in research, direct observation and recording of documents.

Results from this study that the protection of pre-placement for CTKI (Indonesian Labor candidate) is in accordance with Law No. 39 of 2004 regarding the Placement passage and Protection of Indonesian Workers Abroad. Policies implemented by the Department of Labor in the face of falsification of documents by way of mediation or deliberation of the relevant parties. Needed guidance and supervision of CTKI and PPTKIS, and education for the entire community. In addition, inter-sectoral cooperation.

Integrated Services One-Stop will be implemented by the Department of Labor Kendal as a form of government attention to protect its citizens who want to go abroad so that does not happen again falsification of documents.

Keywords: Protection Policy Law, Penal Mediation, Department of Labor, Falsification of Documents